

ABSTRAKSI

Berdasarkan peraturan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 JO Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Indonesia merupakan negara kepulauan potensi perikanan laut di Indonesia tersebar hampir diseluruh wilayah bagian perairan laut, seperti nusantara, perairan laut teritorial , dan perairan laut zona ekonomi eksklusif. Namun dalam pengelolaannya masih banyak ditemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri khususnya dibidang perikanan masih banyak diwarnai maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan dengan berbagai cara , penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, transshipment, dan pelanggaran fishing ground.

Lemahnya penegakan hukum tindak pidana dibidang perikanan antara lain karena belum adanya perangkat hukum yang memadai serta dukungan kelembagaan yang baik, berbagai persoalan yang dihadapi anatara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki pemahaman tentang kasus-kasus dibidang tindak pidana perikanan. Pengadilan perikanan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Tindak Pidana dibidang Perikanan., dibentuknya pengadilan perikanan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan lebih memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang kebijakan untuk melaksanakan aturan dan menyempurnakan aturan kerja pengadilan perikanan.

ABSTRACT

Under the regulations of Law No.31 of 2004 JO Act 45 of 2009 on Fisheries. Indonesia is an archipelago of Indonesia's fishery potentials spread almost throughout the region of sea waters, such as the archipelago, the waters of the territorial sea and the exclusive economic zone of the sea periran. However, the management still many frauds committed by persons who are not responsible. In Indonesia alone, especially in the field of fisheries is still a lot of colored lawlessness done in various ways, the use of fishing gear that is not environmentally friendly, transshipment, and violations of fishing ground. Weak law enforcement criminal acts in the field of fisheries, among others because of the lack of adequate legal tools and institutional support is good, the various problems faced among other limitations of Human Resources who have an understanding of cases of criminal acts in the field of fisheries. Court fishery authority to examine, hear and decide the Crime in the field of fisheries., Tribunal fishery is intended to ensure the implementation fish resources optimally and provide clarity and legal certainty in law enforcement against criminal acts in the field of fisheries and is expected to provide recommendations policies to implement the rules and refine the rules of court fisherie